



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRA SONI**
2. Jabatan : **GUBERNUR**
3. NHK : **525803**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.901.650.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 414.450.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 422.460.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/276 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
5. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 597.740.000
6. Tanah Seluas 1.473 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 805.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO RS CVT/MMPV/2016 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, GMW 500-HEV 2.0 T 4X4 AT / JEEP L.C. HDTP Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 20.474.581**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 3.727.124.581

III. HUTANG

Rp. 424.950.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.302.174.581

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.